

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu menjadi landasan bagi peneliti untuk memperkaya teori yang digunakan dalam penelitian. Dengan melihat penelitian sebelumnya, peneliti dapat dengan mudah menemukan perbandingan yang berguna untuk memposisikan penelitian mereka, menunjukkan orisinalitas penelitian, dan mengembangkan kontribusi baru dalam pengetahuan. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan:

**1. Nurul Irtiah Fajriati, Nurida Isnaeni, Ridhwan (2020) dalam penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Kecamatan Tungkal Ilir)**

Penelitian ini diteliti oleh Nurul Irtiah Fajriati, Nurida Isnaeni, Ridhwan pada tahun 2020. Latar belakang penelitian ini yaitu, lokasi yang dijadikan penelitian (Kecamatan Tungkal Ilir) merupakan kecamatan dengan jumlah penerima bantuan terbanyak sekabupaten Tanjung Jabung Barat. Hal ini disebabkan karena banyaknya kendala dalam pelaksanaan PKH diantaranya, sosialisasi pengenalan program yang belum optimal, komitmen para peserta bantuan terhadap kewajibannya, hingga proses penyaluran penggunaan dana bantuannya oleh peserta PKH juga masih banyak mengalami kendala dan kelemahan. Sub masalah dalam penelitian ini ada 3 yaitu, 1) Bagaimana karakteristik masyarakat penerima bantuan PKH di Kecamatan Tungkal Ilir

2) Bagaimana efektifitas PKH di Kecamatan Tungkal Ilir? 3) Bagaimana pengaruh PKH dalam peningkatan kesejahteraan di Kecamatan Tungkal Ilir?. Penelitian ini berturjuran untuk mengetahui dan menganalisis sub masalah di atas yaitu, 1) karakteristik masyarakat penerima bantuan PKH di Kecamatan Tungkal Ilir 2) efektifitas PKH di Kecamatan Tungkal Ilir 3) pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Tungkal Ilir.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan total populasi sebanyak 2.289 dan sampel yang diambil sebanyak 96 responden, menggunakan teknik *Proportionate Stratified Random Sampling*. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang didapat dari hasil kuesioner, observasi, dan wawancara. Metode analisis data berupa uji validitas, uji reliabilitas, dan regresi linear sederhana.

Hasil dari penelitian ini berdasarkan sub masalah yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan karakteristik responden, yaitu peserta PKH yang berjumlah 96 responden diketahui bahwa rata-rata berjenis kelamin perempuan. Rata-rata responden adalah 39 tahun. Rata-rata pendidikan terakhir responden adalah SD. Rata-rata pekerjaan responden adalah sebagai ibu rumah tangga. Rata-rata pendapatan responden sebelum dan setelah menerima bantuan PKH adalah antara Rp 1.000.000-Rp 1.999.999. Rata-rata pengeluaran responden untuk kegiatan keagamaan adalah zakat. Rata-rata jumlah anggota keluarga responden adalah antara 5-6.

2. Berdasarkan tingkat efektifitas, pelaksanaan Program keluarga Harapan di Kecamatan Tungkal Ilir termasuk dalam kategori efektif karena memiliki rata-rata skor 338,26 dari seluruh item pernyataan yang diberikan.
3. Berdasarkan hasil penelitian maka diperoleh hasil bahwa Program Keluarga Harapan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Tungkal Ilir.

Jadi secara umum, PKH di Kecamatan Tungkal Ilir termasuk dalam kategori efektif. PKH juga berpengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Tungkal Ilir dengan membantu masyarakat miskin peserta PKH untuk memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga dapat meringankan beban pengeluaran yang ditanggung mereka.

## **2. Laviola Zulfira Purnama (2022) dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Pelaksanaan PKH Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Penerima Manfaat Di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjung Pinang**

Penelitian ini diteliti oleh Laviola Zulfira Purnama pada tahun 2022. Latar belakang penelitian ini yaitu, jumlah penduduk miskin di Kota Tanjungpinang mengalami peningkatan yang signifikan. Peneliti juga ingin mengetahui seberapa jauh pelaksanaan PKH di Kota Tanjung Pinang, khususnya di Kelurahan Kampung Bugis, serta Pengaruh PKH terhadap pemenuhan kebutuhan dasar di Kecamatan tersebut dari segi pemenuhan kebutuhan masyarakat serta bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan bantuan-bantuan yang diperoleh untuk mencukupi kebutuhannya. Sub masalah

dalam penelitian ini ada 3 yaitu, 1) Bagaimana pelaksanaan PKH di Kelurahan Kampung Bugis 2) Bagaimana pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat penerima manfaat di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjung Pinang 3) Bagaimana pengaruh pelaksanaan PKH terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat penerima manfaat di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjung Pinang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sub masalah di atas yaitu, 1) Pelaksanaan PKH di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjung Pinang 2) Pemenuhan kebutuhan masyarakat penerima manfaat di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjung Pinang 3) Pengaruh pelaksanaan PKH terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat penerima manfaat di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjung Pinang.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuantitatif Deskriptif dengan sampel sebanyak 49 responden, yang diambil menggunakan teknik *probability sampling* dengan teknik *simple random sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, studi literature, dan studi lapangan yaitu melalui angket dan wawancara. Alat ukur variabel dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal yaitu dengan skala likert. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan *U Mann-Whitney Test*.

Hasil Penelitian ini secara umum adalah terdapat pengaruh yang signifikan yang diberikan PKH terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat penerima manfaat di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjung Pinang, sehingga dapat dikatakan bahwa PKH ini memberikan efek atau

pengaruh terhadap Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Penerima Manfaat Di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjung Pinang.

### **3. Munawwarah Sahib (2021) dalam penelitian tentang Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa**

Penelitian ini dilakukan oleh Munawwarah Sahib pada tahun 2021. Latar belakang penelitian ini adalah tingginya angka pengangguran dan kemiskinan di Kecamatan Bajeng yang disebabkan oleh rendahnya sumber daya manusia, yang mengakibatkan rendahnya daya saing dalam merebut peluang kerja. Selain itu, sebagian besar penduduk di Kecamatan Bajeng bermata pencaharian sebagai petani, dan buruh yang merupakan ciri khas kehidupan masyarakatnya dan masih banyak terdapat keluarga miskin yang tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka dan kurang memperhatikan kesehatan ibu hamil dan anak-anak. Terdapat 2 sub masalah dalam penelitian ini yaitu, 1) Bagaimana pelaksanaan PKH di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa? 2) Bagaimana pengaruh PKH terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan sub permasalahan di atas yaitu, 1) Pelaksanaan PKH di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa 2) Pengaruh PKH terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan sampel sebanyak 55 responden, yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data yang digunakan adalah data primer,

dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan kuesioner, serta alat ukur yang digunakan adalah skala likert. Teknik analisa data yang digunakan yaitu, analisis deskriptif, analisis regresi linear sederhana, dan analisis koefisien penentu.

Hasil Penelitian berdasarkan sub permasalahan sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Dapat disimpulkan bahwa bahwa Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa berjalan dengan sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari seluruh kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yang dapat dijalankan dengan baik.
2. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan berpengaruh positif dan signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dengan persentase 38,4%. Adapun 61,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Jadi secara umum, pelaksanaan PKH di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa berjalan sangat baik. Hal tersebut dapat dilihat dari seluruh kegiatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut yang dapat dijalankan dengan baik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa PKH berpengaruh positif dan signifikan dalam penurunan angka kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.

Dari hasil analisa di atas terdapat beberapa perbedaan dan persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti yang dijabarkan dalam tabel 2.1:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Tujuan	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Teori dan Konsep	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1.	“Analisis Pengaruh Program Keluarga Harapan Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Kecamatan Tungkal Ilir)”	Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Kecamatan Tungkal Ilir.	Nurul Irtiah Fajriati, Nurida Isnaeni, Ridhwan	Kuantitatif Deskriptif	1. PKH 2. Kemiskinan 3. Kesejahteraan	PKH di Kecamatan Tungkal Ilir terbukti efektif dan berdampak positif secara signifikan pada kesejahteraan masyarakat miskin, serta membantu peserta PKH memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mengurangi beban pengeluaran	Persamaan: 1. Metode Penelitian (Kuantitatif) 2. Variabel Penelitian (x) (PKH) Perbedaan: 1. Lokasi Penelitian 2. Waktu Penelitian 3. Sasaran Penelitian (Masyarakat) 4. Variabel Penelitian (y) (kesejahteraan)

No.	Judul Penelitian Terdahulu	Tujuan	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Teori dan Konsep	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
2.	“Pengaruh Pelaksanaan PKH Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Penerima Manfaat Di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjung Pinang”	Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan PKH di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjung Pinang, untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemenuhan kebutuhan masyarakat penerima manfaat di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjung Pinang, serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh pelaksanaan PKH terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat penerima manfaat di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjung Pinang	Laviola Zulfira Purnama	Kuantitatif Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesejahteraan Sosial</li> <li>2. Pelayanan Sosial</li> <li>3. Pekerjaan Sosial</li> <li>4. Kemiskinan</li> <li>5. PKH</li> <li>6. Pemenuhan Kebutuhan Dasar</li> </ol>	PKH memberikan pengaruh signifikan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat penerima manfaat di Kelurahan Kampung Bugis, Tanjung Pinang	Persamaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode Penelitian (Kuantitatif)</li> <li>2. Variabel Penelitian (x) (PKH)</li> </ol> Perbedaan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi Penelitian</li> <li>2. Waktu Penelitian</li> <li>3. Sasaran Penelitian (Masyarakat)</li> <li>4. Variabel Penelitian (y) (kebutuhan dasar)</li> </ol>



No.	Judul Penelitian Terdahulu	Tujuan	Nama Peneliti	Metode Penelitian	Teori dan Konsep	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
3.	“Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa”	Mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui apakah Program Keluarga Harapan berpengaruh terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa	Munawwarah Sahib	Kuantitatif Deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kesejahteraan Masyarakat</li> <li>2. Kemiskinan</li> <li>3. PKH</li> </ol>	<p>Pelaksanaan PKH di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, berjalan lancar dengan seluruh kegiatan yang dijalankan dengan baik. Penelitian menunjukkan bahwa PKH memberikan dampak positif dan signifikan dalam menurunkan angka kemiskinan di wilayah tersebut.</p>	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Metode Penelitian (Kuantitatif)</li> <li>2. Variabel Penelitian (x) (PKH)</li> </ol> <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lokasi Penelitian</li> <li>2. Waktu Penelitian</li> <li>3. Sasaran Penelitian</li> <li>4. Variabel Penelitian (y) (kemiskinan)</li> </ol>

Berdasarkan analisis hasil penelitian terdahulu, peneliti menemukan banyak keterkaitan mulai dari metode penelitian hingga variabel yang digunakan. Fokus penelitian ini adalah pada pengaruh, termasuk pengertian dan aspek yang terkait, yang menjadi referensi yang sangat berharga dan dapat dikembangkan lebih lanjut. Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini mengisi celah yang sebelumnya belum dieksplorasi di Kabupaten Sumedang. Selain itu, terdapat perbedaan karakteristik antara populasi yang diteliti di luar Jawa Barat dengan yang ada di Jawa Barat yang menjadi subjek penelitian, terutama di Desa Cikondang, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang. Selain itu, penelitian juga mengkaji aspek kemandirian pada KPM, yang merupakan suatu aspek yang belum digarap oleh penelitian sebelumnya.

## **2.2 Tinjauan Konseptual**

### **2.2.1 Tinjauan Tentang Kemandirian**

#### **2.2.1.1 Definisi Kemandirian**

Kemandirian berasal dari istilah "*independence*" yang menggambarkan keadaan di mana seseorang tidak bergantung pada orang lain dalam membuat keputusan dan memiliki keyakinan diri yang kuat. Kemandirian (*self-reliance*) adalah kemampuan untuk mengurus segala sesuatu yang dimilikinya sendiri, termasuk kemampuan mengatur waktu, berpikir, dan berjalan secara independen, serta keberanian dalam mengambil risiko dan menyelesaikan masalah.

Menurut Chaplin (dalam Endriani, A., dkk, 2020:12) kemandirian merupakan kebebasan individu untuk untuk menentukan pilihan serta menguasai dan mengatur hidupnya sendiri sebagai satu kesatuan yang mandiri. Sedangkan

Sumahamijaya (dalam Endriani, A., dkk, 2020:12) menyatakan bahwa kemandirian merujuk pada kemampuan atau kondisi untuk berdiri sendiri tanpa perlu bergantung pada orang lain. Lalu, Basri (dalam Sobri, M., 2020:7) menjelaskan bahwa Kemandirian adalah keadaan di mana seseorang dapat mengambil keputusan atau melakukan tindakan tanpa memerlukan bantuan dari pihak lain.

Berdasarkan dari beberapa definisi kemandirian oleh para ahli di atas, dapat dipahami bahwa kemandirian merupakan kemampuan atau keadaan di mana seseorang dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada bantuan atau dukungan orang lain. Ini mencakup kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan melakukan tindakan tanpa memerlukan bantuan dari pihak lain. Secara keseluruhan, kemandirian menandakan tingkat otonomi dan kepercayaan diri seseorang dalam mengelola kehidupannya secara mandiri.

### **2.2.1.2 Aspek-Aspek Kemandirian**

Havighurst (dalam Endriani, A., dkk, 2020:13) menyatakan kemandirian terdiri dari empat aspek, yaitu:

#### **1. Aspek Emosi**

Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengontrol emosi dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi. Kemampuan dalam merasakan dan mengolah emosi secara mandiri oleh individu dalam menentukan berbagai tindakan yang baik dan salah, menghadapi problem-problem yang dihadapi dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya.

## 2. Aspek Ekonomi

Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan mengatur ekonomi dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi. Kemandirian untuk bisa mendapatkan penghasilan berupa uang atau materi lainnya, mengaturnya dan menggunakannya secara mandiri dan tidak lagi tergantung.

## 3. Aspek Intelektual

Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Kemampuan berpikir mandiri, melakukan analisis, menerjemahkan serta melakukan sintesis secara otonom dan tidak lagi tergantung pada orang-orang disekitarnya dalam pengetahuan yang dimiliki.

## 4. Aspek Sosial

Aspek ini ditunjukkan dengan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak tergantung. Meliputi kemampuan bergaul, beradaptasi, simpati, empati, menilai tindakan-tindakan sosial secara sendiri serta memutuskan mana aspek sosial yang perlu didahulukan dan diakhirkan.

Berdasarkan pendapat Havighurst tersebut terdapat empat aspek yang menjadi indikator kemandirian seseorang, yaitu aspek emosi, ekonomi, intelektual, dan sosial. Aspek-aspek ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana seseorang dapat dianggap mandiri dalam kehidupannya.

### **2.2.1.3 Ciri-Ciri Kemandirian**

Menurut Parker (dalam Musbikin, I., 2021:6) pribadi yang mandiri memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

#### **1. Tanggung jawab**

Individu memiliki tugas untuk menyelesaikan sesuatu dan diminta untuk memberikan pertanggung jawaban atas hasil pekerjaannya

#### **2. Independensi**

Suatu keadaan di mana individu tidak bergantung pada otoritas dan tidak memerlukan bimbingan. Independensi juga mencakup konsep kemampuan mengurus diri sendiri dan menyelesaikan masalahnya secara mandiri

#### **3. Otonomi dan Kebebasan**

Individu memiliki kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhi apa yang akan terjadi pada dirinya sendiri

#### **4. Keterampilan Memecahkan Masalah**

Dengan dukungan dan bimbingan yang tepat, individu akan termotivasi untuk menemukan solusi bagi masalah-masalah praktis relasional mereka sendiri

Dari beberapa ciri-ciri kemandirian yang dinyatakan oleh Parker, dapat disimpulkan bahwa kemandirian dapat ditandai dengan adanya tanggung jawab, independensi, memiliki otonomi kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri, serta memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah sendiri.

#### **2.2.1.4 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kemandirian**

Menurut Ali dan Asrori (dalam Sobri, M., 2020:11) terdapat beberapa faktor yang memengaruhi kemandirian, yaitu:

##### **1. Gen atau Keturunan Orangtua**

Orang tua yang memiliki sifat kemandirian tinggi sering kali memiliki anak yang juga mandiri. Namun, faktor keturunan ini masih menjadi perdebatan karena ada yang berpendapat bahwa bukan sifat kemandirian orang tua yang diturunkan kepada anaknya, melainkan kemandirian tersebut muncul dari cara orang tua mendidik anaknya.

##### **2. Pola Asuh Orangtua**

Cara orang tua mengasuh atau mendidik anak akan mempengaruhi perkembangan kemandirian anak remajanya. Orang tua yang terlalu sering melarang atau mengucapkan kata "jangan" kepada anak tanpa memberikan penjelasan yang rasional dapat menghambat perkembangan kemandirian anak. Sebaliknya, orang tua yang menciptakan suasana aman dalam interaksi keluarga akan mendukung kelancaran perkembangan anak. Demikian juga, orang tua yang cenderung sering membandingkan satu anak dengan anak lainnya dapat memberikan dampak negatif pada perkembangan kemandirian anak.

##### **3. Sistem Pendidikan di Sekolah**

Proses pendidikan di sekolah yang tidak mengembangkan demokratisasi pendidikan dan cenderung menekankan indoktrinasi tanpa argumentasi dapat menghambat perkembangan kemandirian remaja. Demikian pula, proses pendidikan yang lebih menekankan pentingnya pemberian sanksi atau hukuman

juga dapat menghalangi perkembangan kemandirian remaja. Sebaliknya, proses pendidikan yang lebih mengutamakan penghargaan terhadap potensi anak, pemberian hadiah, dan penciptaan kompetensi positif akan memperlancar perkembangan kemandirian remaja.

#### 4. Sistem Kehidupan di Masyarakat

Sistem kehidupan masyarakat yang terlalu menekankan pentingnya hierarki struktur sosial, merasa kurang aman atau mencekam, serta kurang menghargai manifestasi potensi remaja dalam kegiatan produktif dapat menghambat perkembangan kemandirian remaja. Sebaliknya, lingkungan masyarakat yang aman, menghargai ekspresi potensi remaja dalam berbagai bentuk kegiatan, dan tidak terlalu hierarkis akan mendorong dan mendukung perkembangan kemandirian remaja.

Masrun (dalam Kharisma, Y. dan Husnul, K., 2023: 45) menyatakan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kemandirian, antara lain:

##### 1. Usia

Seseorang dengan usia muda lebih cenderung bergantung pada bantuan orang lain, tetapi seiring bertambahnya usia, ketergantungan tersebut akan berkurang secara bertahap

##### 2. Jenis Kelamin

Perbedaan sifat antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh perlakuan yang berbeda terhadap keduanya. Laki-laki lebih sering diberi kesempatan untuk mandiri dan menghadapi risiko, serta diharapkan untuk lebih inisiatif dan orisinal dibandingkan dengan perempuan.

### 3. Konsep Diri

Konsep diri membantu individu merasa kompeten dalam mengambil keputusan. Lebih lanjut, cara individu memandang dan menilai dirinya secara keseluruhan akan mempengaruhi perilakunya. Individu yang merasa dirinya mampu cenderung akan lebih mandiri, sedangkan mereka yang merasa kurang akan lebih cenderung bergantung pada orang lain.

### 4. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu usaha untuk mempengaruhi perkembangan pandangan hidup individu, termasuk sikap, tingkah laku, dan perbuatannya, yang bertujuan untuk membentuk proses pendirian hidup atau cita-cita yang dapat dipertanggungjawabkan dari perspektif pendidikan.

### 5. Keluarga

Keluarga, terutama orang tua, memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk dasar-dasar kepribadian individu, serta dalam mengembangkan kemandirian individu.

Dapat disimpulkan bahwa dalam mencapai kemandirian, individu tidak dapat mengabaikan faktor-faktor yang menjadi dasar pembentukan kemandirian tersebut. Faktor-faktor ini memegang peranan penting dalam kehidupan individu dan akan menentukan sejauh mana individu tersebut mengembangkan kemampuan mandiri dan bertanggung jawab dalam menjalani kehidupan mereka ke depan.



### **2.2.1.5 Bentuk-Bentuk Kemandirian**

Havighurst (dalam Musbikin, 2021: 6) membedakan kemandirian ke dalam empat bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Kemandirian emosi, yaitu kemampuan untuk mengatur dan mengontrol emosi sendiri tanpa tergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan emosi.
2. Kemandirian ekonomi, yaitu kemampuan untuk mengelola keuangan sendiri tanpa bergantung pada orang lain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.
3. Kemandirian intelektual, yaitu kemampuan untuk menyelesaikan tantangan atau masalah yang dihadapi secara mandiri.
4. Kemandirian sosial, yaitu kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain secara mandiri tanpa tergantung pada tindakan orang lain.

Keempat bentuk kemandirian yang dinyatakan oleh Havighurst tersebut saling berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kemandirian tidak hanya bermanfaat bagi individu itu sendiri, tetapi juga memiliki dampak yang positif bagi orang lain. Hal ini karena kemandirian tidak hanya berdampak pada diri sendiri, tetapi juga mempengaruhi interaksi dengan orang lain.

## **2.2.2 Tinjauan Tentang PKH**

### **2.2.2.1 Definisi Program Keluarga Harapan (PKH)**

Menurut Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dalam Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau individu miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program

penanganan fakir miskin. Data tersebut diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, yang menetapkan penerima manfaat dari program ini.

PKH merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan, dengan fokus khusus pada memutus siklus kemiskinan yang berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya di kalangan masyarakat yang miskin dan rentan. Kebijakan PKH diinisiasi sebagai respons terhadap kondisi krisis global, di mana terjadi penurunan kondisi ekonomi yang membuat sulitnya akses terhadap kebutuhan dasar, terutama bagi masyarakat yang berada dalam kelompok miskin dan rentan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mencegah potensi peningkatan jumlah masyarakat yang terpinggirkan akibat situasi tersebut. Di luar negeri PKH ini lebih dikenal dengan nama *Conditional Cash Transfer (CCT)*.

Secara garis besar, PKH bertujuan untuk melindungi ibu hamil dan anak-anak yang sedang bersekolah dari kerentanan, dengan memberikan akses kepada mereka terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Keluarga Sangat Miskin (KSM), akibat kemiskinan yang dialaminya, seringkali tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam hal kesehatan dan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem perlindungan sosial yang dapat menjamin akses terhadap kebutuhan dasar tersebut. PKH merupakan salah satu langkah pemerintah dalam membangun sistem perlindungan sosial di Indonesia.

Salah satu bentuk peningkatan kemandirian bagi masyarakat atau penerima bantuan adalah melalui proses yang disebut Graduasi Mandiri penerima PKH. Bantuan sosial untuk KPM PKH tidak bersifat permanen, karena ada persyaratan di mana masih banyak masyarakat miskin yang memerlukan bantuan dan memenuhi

kriteria penerimaan. Keluarga Penerima PKH dapat menerima bantuan maksimal selama 6 tahun, setelah itu akan dilakukan evaluasi keanggotaan untuk menentukan apakah masih memenuhi syarat atau tidak. Jika sudah tidak memenuhi syarat, penerima diharapkan melakukan graduasi mandiri.

#### **2.2.2.2 Tujuan PKH**

Tujuan PKH menurut peraturan Menteri Sosial No. 1 Tahun 2018 Pasal 2 memuat lima tujuan, yaitu:

1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan;
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat;

Berdasarkan tujuan PKH yang dikemukakan oleh menteri sosial di atas, dapat disimpulkan bahwa program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup KPM melalui akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial serta pengurangan beban pengeluaran. Perubahan perilaku dan kemandirian diharapkan terjadi dalam akses layanan kesehatan dan pendidikan. Selain mengurangi kemiskinan, program juga memperkenalkan manfaat keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.

### **2.2.2.3 Manfaat PKH**

1. menciptakan perubahan perilaku pada keluarga sangat miskin, agar memberikan perhatian lebih pada pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka
2. Secara jangka pendek memberikan efek pendapatan dengan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga yang sangat miskin
3. Pada jangka panjang dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi dengan meningkatkan kualitas kesehatan, nutrisi, pendidikan, dan kapasitas pendapatan anak keluarga sangat miskin
4. Mengurangi pekerja anak
5. Mempercepat pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs) melalui peningkatan akses pendidikan, kesehatan ibu hamil, pengurangan angka kematian balita, dan meningkatkan kesetaraan gender.

### **2.2.3 Tinjauan Tentang KPM PKH**

Peraturan Menteri Sosial RI No.1 Tahun 2018 Tentang PKH dalam Pasal 3 disebutkan bahwa sasaran PKH merupakan “Keluarga dan atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial”.

#### **2.2.3.1 Kriteria KPM PKH**

Dalam Peraturan Menteri Sosial RI No.1 Tahun 2018 Tentang PKH dalam Pasal 5 dijelaskan mengenai kriteria komponen KPM Bantuan PKH, yang terbagi ke dalam tiga kriteria, yaitu:

1. Kriteria komponen kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:
  - 1) Ibu hamil/menyusui; dan

2) Anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun;

2. Kriteria komponen pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:

- 1) Anak sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah atau sederajat;
- 2) Anak sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah atau sederajat;
- 3) Anak sekolah menengah atas/ madrasah aliyah atau sederajat; dan
- 4) Anak usia 6 (enam) sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.

3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 meliputi:

- 1) Lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun; dan
- 2) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Selain itu, dalam Buku Kerja Pendamping dan Operator PKH Tahun 2015 menjelaskan terkait penerima bantuan PKH yaitu penerima bantuan PKH adalah keluarga sangat miskin (KSM) peserta PKH yang memiliki satu atau beberapa komponen PKH, yaitu:

1. Ibu hamil/ibu nifas/anak balita;
2. Anak berusia kurang dari 7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (anak pra-sekolah);
3. Anak usia 7-21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib; belajar 12 tahun
4. Anak penyandang disabilitas berusia 0-21 tahun.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa program ini ditujukan kepada KPM yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam

undang-undang sebagai syarat keikutsertaan dalam program. Dengan demikian, keluarga atau individu yang miskin dan rentan namun tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk PKH tidak akan dapat menjadi penerima manfaat dari program ini.

#### **2.2.3.2 Syarat-Syarat KPM PKH**

1. Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) ditandai dengan memiliki kartu identitas (KTP).
2. Terdaftar sebagai golongan keluarga berkebutuhan pada data keluarahan/desa setempat.
3. Bukan salah satu anggota ASN, TNI, dan POLRI.
4. Belum pernah menerima bantuan lain seperti BLT UMKM, BLT Subsidi Gaji, dan Kartu Prakerja.
5. Telah terdaftar di DTKS Kemensos RI.

#### **2.2.3.3 Hak dan Kewajiban KPM PKH**

Menurut Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 Tahun 2018 Pasal 6 menyebutkan bahwa KPM PKH berhak mendapatkan:

1. Bantuan Sosial PKH;
2. Pendampingan PKH;
3. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
4. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Sementara itu, dalam Pasal 7 Peraturan menteri Sosial No. 1 Tahun 2018, KPM PKH berkewajiban untuk:

1. Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun, minimal 2 kali dalam setahun;
2. Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen) dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 (dua belas) tahun selama 1 bulan; dan
3. Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai dari 60 (enam puluh) tahun dan/atau penyandang disabilitas berat
4. Menghadiri pertemuan kelompok atau P2K2

Dari penjabaran hak dan kewajiban KPM PKH di atas dapat disimpulkan bahwa PKH adalah program bantuan yang diberikan dengan syarat kepada keluarga penerima manfaat, yang memiliki hak dan tanggung jawab di dalamnya. Keluarga penerima manfaat PKH diwajibkan untuk memenuhi kewajiban tertentu agar tetap dapat mempertahankan keanggotaannya dalam program ini, dan jika tidak, mereka akan dikenakan sanksi. Ketika keluarga penerima manfaat tidak mendapatkan hak yang seharusnya, pendamping PKH memiliki tugas untuk mengadvokasi mereka.

#### **2.2.3.4 Besaran Bantuan PKH**

Bantuan PKH untuk Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar di Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) turun setiap tahunnya. Berikut rincian dana yang akan diberikan sesuai kategorinya, dijabarkan pada tabel 2.2:

Tabel 2.2 Skema Bantuan PKH

No.	Kategori	Indeks/Tahun (Rp.)	Indeks/3 Bulan (Rp.)
1.	Ibu Hamil	3.000.000	750.000
2.	Anak Usia 0 s.d 6 tahun	3.000.000	750.000
3.	Anak Sekolah SD	900.000	225.000
4.	Anak Sekolah SLTP	1.500.000	375.000
5.	Anak Sekolah SLTA	2.000.000	500.000
6.	Disabilitas Berat	2.400.000	600.000
7.	Lanjut Usia 60 tahun ke atas	2.400.000	600.000

Sumber: Pedoman PKH Tahun 2021

## 2.2.4 Tinjauan Tentang Pekerjaan Sosial dengan Kemiskinan

### 2.2.4.1 Definisi Kemiskinan

Edi Suharto (2014: 134) menyatakan kemiskinan secara umum didefinisikan dalam konteks ekonomi sebagai keadaan di mana seseorang memiliki pendapatan yang rendah atau bahkan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, serta kekurangan dalam menerima keuntungan-keuntungan non-material. Sedangkan, menurut Suparlan (dalam Papilaya, J., 2020: 79-80) kemiskinan adalah kondisi di mana sejumlah individu atau kelompok mengalami kekurangan materi yang signifikan dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum di masyarakat tempat mereka tinggal. Lalu, Soekanto (dalam Papilaya, J., 2020: 80) menjelaskan kemiskinan sebagai situasi di mana seseorang tidak mampu mempertahankan gaya hidup yang setara dengan kebanyakan individu dalam kelompoknya, dan juga tidak memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, mental, dan emosionalnya di dalam komunitas tersebut.

Berdasarkan dari definisi kemiskinan menurut para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan secara umum merupakan kondisi di mana seseorang atau kelompok memiliki pendapatan rendah atau tidak mencukupi untuk



memenuhi kebutuhan dasar serta mengalami kekurangan materi dan non-materi dibandingkan dengan standar umum dalam masyarakat. Ini juga mencakup ketidakmampuan mempertahankan gaya hidup setara dengan mayoritas dalam kelompok dan kesulitan dalam mengoptimalkan potensi fisik, mental, dan emosional dalam komunitas.

#### **2.2.4.2 Dimensi Kemiskinan**

David Cox dalam (Suharto, E., 2014: 132) membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi:

##### **1. Kemiskinan yang diakibatkan oleh globalisasi**

Globalisasi menciptakan pihak yang diuntungkan dan dirugikan. Negara-negara maju biasanya menjadi pemenang, sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.

##### **2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan**

Kemiskinan subsisten (kemiskinan yang disebabkan oleh rendahnya tingkat pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan yang muncul akibat peminggiran kawasan pedesaan dalam proses pembangunan), dan kemiskinan yang disebabkan oleh karakteristik dan kecepatan pertumbuhan perkotaan. Kemiskinan ini disebabkan akibat tidak meratanya tingkat pembangunan di suatu daerah.

##### **3. Kemiskinan Sosial**

Kemiskinan sosial merujuk pada keadaan di mana individu atau kelompok mengalami kekurangan dalam hal akses terhadap sumber daya sosial dan

kesempatan yang penting untuk kesejahteraan mereka. Ini mencakup ketidakmampuan untuk terlibat dalam aktivitas sosial, memperoleh dukungan sosial, atau mendapatkan manfaat dari jaringan sosial yang biasanya tersedia bagi orang-orang yang lebih terintegrasi dalam masyarakat. Kemiskinan ini biasa dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.

#### 4. Kemiskinan Konvensional

Kemiskinan yang disebabkan oleh kejadian-kejadian atau faktor-faktor eksternal di luar kondisi kemiskinan itu sendiri, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

#### **2.2.4.3 Kemiskinan dalam Pandangan Pekerjaan Sosial**

Edi Suharto (2014: 148) Secara konseptual pekerjaan sosial memandang bahwa kemiskinan merupakan persoalan-persoalan multidimensional, yang bermatra ekonomi-sosial dan individual-struktural. Berdasarkan perspektif ini, ada tiga kategori kemiskinan yang menjadi pusat perhatian pekerjaan sosial, yaitu:

1. Kelompok yang paling miskin (*destitute*) atau yang sering didefinisikan sebagai fakir miskin. Kelompok ini secara absolut memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan (umumnya tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali) serta tidak memiliki akses terhadap beberapa pelayanan sosial.
2. Kelompok miskin (*poor*). Kelompok ini memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan namun secara relative memiliki akses terhadap pelayanan dasar (misalnya, masih memiliki sumber-sumber finansial, memiliki pendidikan dasar atau tidak buta huruf)

3. Kelompok rentan (*vulnerable group*). Kelompok ini dapat dikategorikan bebas dari kemiskinan, karena memiliki kehidupan yang relative lebih ketimbang kelompok *destitute* maupun miskin. Namun sebenarnya kelompok yang sering disebut “*near poor*” (agak miskin) ini masih rentan terhadap berbagai perubahan sosial di sekitarnya. Mereka seringkali berpindah dari status “rentan” menjadi “miskin” dan bahkan “*destitute*” bila terjadi krisis ekonomi dan tidak mendapatkan pertolongan sosial

Pekerja sosial merupakan profesi yang memberikan pertolongan kemanusiaan dengan tujuan untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat agar mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan peranannya. Sebagaimana halnya profesi kedokteran berkaitan dengan konsepsi kesehatan, psikolog dengan konsepsi perilaku adekwat, guru dengan konsepsi pendidikan, dan pengacara dengan konsepsi keadilan, maka keberfungsian sosial merupakan konsepsi yang penting bagi pekerjaan sosial karena merupakan pembeda antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi lainnya. Maka, pendekatan pekerjaan sosial dalam menangani kemiskinan juga pada dasarnya harus diarahkan untuk meningkatkan keberfungsian sosial (*social functioning*) masyarakat miskin yang dibantunya

#### **2.2.4.4 Penanganan Kemiskinan dalam Pandangan Pekerjaan Sosial**

Edi Suharto (2014: 150) menyatakan strategi penanganan kemiskinan pekerjaan sosial terfokus pada peningkatan kemampuan orang miskin dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sesuai dengan statusnya. Namun, karena tugas-tugas kehidupan dan status merupakan konsepsi yang dinamis dan multi-wajah,

makan intervensi pekerjaan sosial senantiasa melihat sasaran perubahan (orang miskin) tidak terpisah dari lingkungan dan situasi yang dihadapinya. Prinsip ini dikenal dengan pendekatan “*person-in-environment*”. Dianalogikan dengan strategi pemberian ikan dan kail, maka strategi pengentasan kemiskinan tidak hanya bermatra individual, yakni dengan memberi ikan; dan memberi kail kepada si miskin. Lebih jauh lagi, pekerjaan sosial berupaya untuk mengubah struktur-struktur sosial yang tidak adil, dengan:

1. Memberi keterampilan memancing
2. Menghilangkan dominasi kepemilikan kolam ikan oleh kelompok-kelompok elit dalam masyarakat; dan
3. Mengusahakan perluasan akses pemasaran bagi penjual ikan hasil memancing tersebut

Berdasarkan analogi tersebut, maka ada dua pendekatan pekerjaan sosial yang satu sama lain saling terkait. Pendekatan pertama melihat penyebab kemiskinan dan sumber-sumber penyelesaian kemiskinan dalam kaitannya dengan lingkungan dimana si miskin tinggal, baik dalam konteks keluarga, kelompok pertamanan (*peer group*), maupun masyarakat. Penanganan kemiskinan yang bersifat kelembagaan (*institutional*) biasanya didasari oleh pertimbangan ini. Pendekatan kedua melihat si miskin dalam konteks situasinya, strategi pekerjaan sosial berpijak pada prinsip-prinsip *individualitation* dan *self-determination* yang melihat si miskin secara individual yang memiliki masalah dan kemampuan unik. Program anti kemiskinan dalam kacamata ini disesuaikan dengan kejadian-kejadian

dan/atau masalah-masalah yang dihadapinya. Beberapa bentuk program penanganan kemiskinan yang didasari dua pendekatan ini, antara lain:

1. Pemberian bantuan sosial dan rehabilitasi sosial yang diselenggarakan oleh panti-panti
2. Program jaminan, perlindungan dan asuransi kesejahteraan sosial
3. Program pemberdayaan masyarakat yang meliputi pemberian modal usaha, pelatihan usaha ekonomi produktif, pembentukan pasar sosial dan koperasi, pelatihan dan pembinaan keluarga muda mandiri, pembinaan partisipasi sosial masyarakat, pembinaan anak dan remaja.
4. Program kedaruratan. Misalnya, bantuan uang, barang dan tenaga bagi korban bencana alam.
5. Program “penanganan bagian yang hilang”. Strategi yang oleh Caroline Moser disebut sebagai “*the missing piece strategy*) ini meliputi program-program yang dianggap dapat memutuskan rantai kemiskinan yang kalau “disentuh” akan membawa dampak pada aspek-aspek lainnya. Misalnya, pemberian kredit, pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE), bantuan stimulant untuk usaha-usaha ekonomis produktif skala mikro.

#### **2.2.4.5 Relevansi Pekerjaan Sosial dalam Setting Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan kesejahteraan sosial yang ada, yang mana permasalahan kesejahteraan sosial itu merupakan hal yang perlu diatasi oleh profesi pekerjaan sosial. Maka dari itu, pekerjaan sosial memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam menangani masalah kemiskinan. Pekerja sosial tidak hanya mengidentifikasi penyebab kemiskinan, tetapi juga berfokus

pada memberdayakan masyarakat miskin dengan memberikan akses terhadap sumber daya dan peluang yang diperlukan. Mereka juga memberikan dukungan emosional, konseling, dan bimbingan praktis kepada individu dan keluarga yang terkena dampak kemiskinan, serta membantu mereka mengatasi tantangan yang dihadapi. Selain itu, pekerja sosial juga berperan dalam melakukan advokasi untuk kebijakan dan program-program yang mendukung penanggulangan kemiskinan, serta memperjuangkan perubahan struktural yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dengan melakukan upaya pencegahan kemiskinan melalui edukasi, pelatihan, dan pembangunan kapasitas di tingkat komunitas, pekerja sosial juga turut berkontribusi dalam melindungi kelompok rentan dan mengurangi risiko kemiskinan secara menyeluruh.

#### **2.2.4.6 Relevansi Pekerjaan Sosial dengan PKH**

PKH merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengembangkan sistem perlindungan sosial di Indonesia khususnya dalam ranah kemiskinan dan Pekerja sosial memiliki peran tersendiri dalam program tersebut. Diantaranya yaitu, sebagai supervisor PKH di tingkat Kabupaten dan menjadi pendamping PKH di tingkat Kecamatan. Melalui partisipasinya dalam program bantuan pemerintah, diharapkan bahwa pekerja sosial mampu merubah pandangan KPM mengenai pentingnya kemandirian dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah.

Implementasi PKH terhadap KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sangat berkaitan dengan pengetahuan dan keahlian dalam bidang Pekerjaan Sosial. Pekerja sosial memainkan peran penting dalam memberikan pendampingan sosial kepada KPM PKH dengan tujuan meningkatkan kemampuan

sosial mereka. Pengetahuan tentang kemampuan KPM dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan dapat menjadi indikator efektivitas dari PKH. Dengan demikian, dapat dinilai apakah (PKH telah dimanfaatkan secara optimal oleh KPM atau tidak.

## **2.2.5 Tinjauan tentang Pemberdayaan Masyarakat**

### **2.2.5.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

*Empowerment* atau yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan barat utamaya Eropa. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemerkuasaan (*Empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Karena ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan kemampuan untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka Edi Suharto (2005: 57).

Ife (dalam Fahrudin, A., 2011: 17) mengatakan pemberdayaan bertujuan memberikan kekuatan atau kekuasaan kepada orang-orang yang tidak beruntung. Rappaport (1984) mengartikan apabila *Empowerment* sebagai suatu cara dimana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya sendiri.

Dari beberapa definisi pemberdayaan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan suatu usaha atau upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kemampuan dan kemandirian individu atau masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Masyarakat dapat tahu potensi dan permasalahan yang

dihadapinya dan mampu menyelesaikannya menurut Tantan Hermansyah (dalam Ramadhani, A., Lukman, H., & Budi, S., 2019: 246).

#### **2.2.5.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan menurut Sutoro Eko (dalam Marzaman, A., 2018: 52). Konsep pemberdayaan (masyarakat desa) dapat dipahami juga dengan dua cara pandang. Pertama, pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdiri masyarakat. Posisi masyarakat bukanlah obyek penerima manfaat (*beneficiaries*) yang tergantung pada pemberian dari pihak luar seperti pemerintah, melainkan dalam posisi sebagai subyek (agen atau partisipan yang bertindak) yang berbuat secara mandiri. Berbuat secara mandiri bukan berarti lepas dari tanggungjawab negara. Pemberian layanan publik (kesehatan, pendidikan, perumahan, transportasi dan seterusnya) kepada masyarakat tentu merupakan tugas (kewajiban) negara secara *given*. Masyarakat yang mandiri sebagai partisipan berarti terbukanya ruang dan kapasitas mengembangkan potensi-kreasi, mengontrol lingkungan dan sumberdayanya sendiri, menyelesaikan masalah secara mandiri, dan ikut menentukan proses politik di ranah negara. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan dan pemerintahan menurut Sutoro Eko (dalam Marzaman, A., 2018: 52).



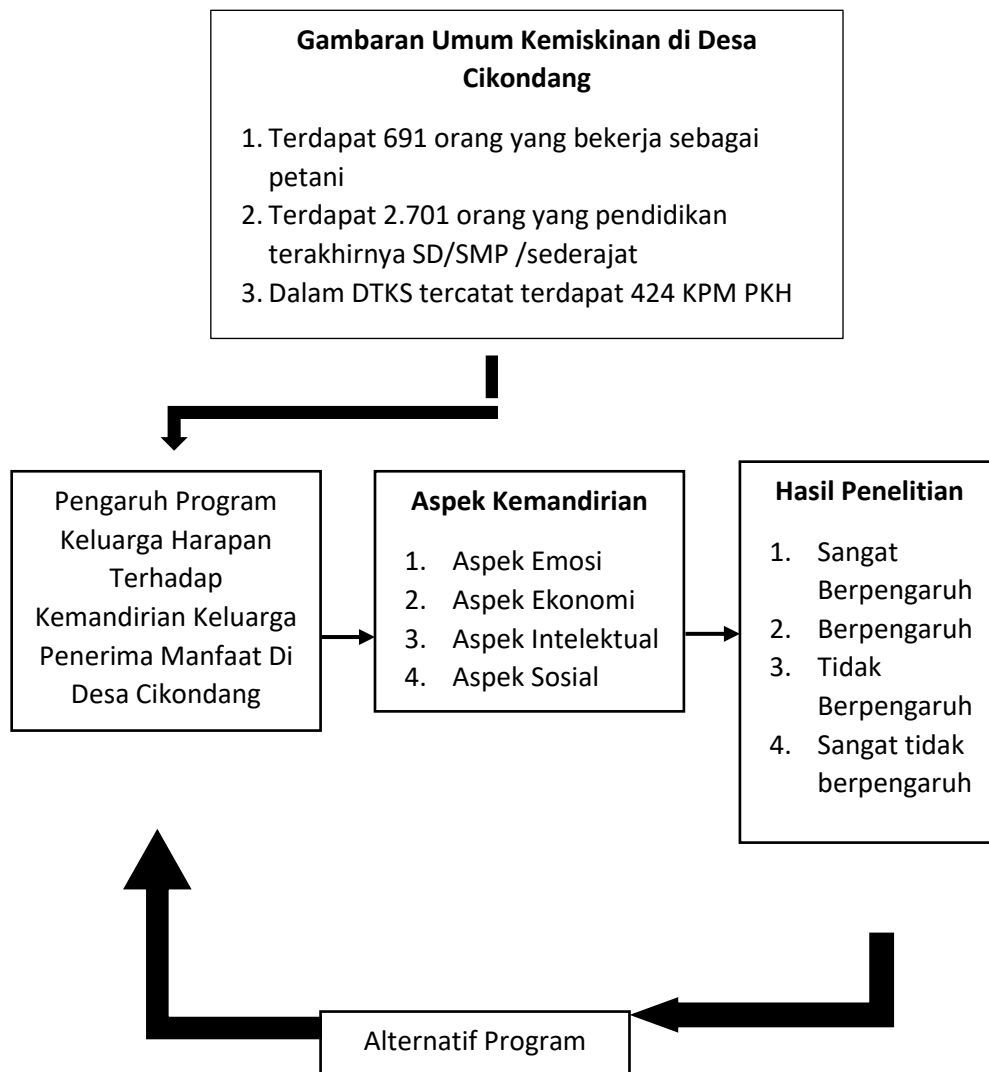
### **2.2.5.3 Tugas Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan oleh banyak elemen: pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, pers, partai politik, lembaga donor, aktor-aktor masyarakat sipil, atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri. Birokrasi pemerintah tentu saja sangat strategis karena mempunyai banyak keunggulan dan kekuatan yang luar biasa ketimbang unsur-unsur lainnya: mempunyai dana, aparat yang banyak, kewenangan untuk membuat kerangka legal, kebijakan untuk pemberian layanan publik, dan lain-lain. Proses pemberdayaan bisa berlangsung lebih kuat, komprehensif dan berkelanjutan bila berbagai unsur tersebut membangun kemitraan dan jaringan yang didasarkan pada prinsip saling percaya dan menghormati menurut Sutoro Eko (dalam Marzaman, A., 2018: 53).

## **2.3 Kerangka Pemikiran**

Menurut Uma Sekaran (Sugiyono, dalam Timisela, 2023) Kerangka berpikir adalah suatu konseptualisasi tentang bagaimana teori berinteraksi dengan faktor-faktor yang dianggap penting. Dengan demikian, kerangka berpikir menjadi dasar pemahaman yang mendukung konsepsi-konsepsi lainnya. Ini merupakan fondasi yang mendasar dan menjadi landasan bagi segala pemikiran atau proses dalam sebuah penelitian.

Dengan merujuk pada konteks permasalahan yang telah dibahas serta tinjauan pustaka yang tersaji dalam bab sebelumnya, peneliti mengekspresikan kerangka berpikir dalam suatu skema untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas sebagaimana terlihat pada gambar 2.1:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian yang dilaksanakan, berangkatan dari gambaran kemiskinan di Desa Cikondang yang mana terdapat 691 orang yang bekerja sebagai petani dan 2.701 orang yang pendidikan terakhirnya SD/SMP/sederajat (Profil Desa Cikondang, 2022) serta tercantum dalam DTKS terdapat 424 KPM PKH. Peneliti ingin mengetahui bagaimana Pengaruh Program Keluarga Harapan Terhadap Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat Di Desa Cikondang, Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang. Menurut Havighurst (dalam Endriani, A., dkk, 2020:13)

menyatakan kemandirian terdiri dari empat aspek, yaitu aspek emosi, aspek ekonomi, aspek intelektual, dan aspek sosial yang bermanfaat untuk menentukan kondisi kemandirian KPM PKH.

Aspek emosi, aspek ekonomi, aspek intelektual, dan aspek sosial, dari keempat aspek tersebut peneliti ingin melihat bagaimana pengaruh PKH di Desa Cikondang. Dimana nantinya, hasil penelitian akan dianalisa dan dikategorikan menjadi 4 kategori, yaitu: Sangat Berpengaruh, Berpengaruh, Tidak Berpengaruh, Sangat Tidak Berpengaruh, dari kategori tersebut dapat dilihat pengaruh PKH di Desa Cikondang masuk ke kategori yang mana. Setelah mengevaluasi pengaruh dari Program Keluarga Harapan, peneliti kemudian merancang program alternatif dengan tujuan untuk memaksimalkan Pengaruh PKH di Desa Cikondang Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang, khususnya dari segi kemandirian KPM nya.